

**Judul** : DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Penerimaan Negara  
**Tanggal** : Rabu, 31 Agustus 2016  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 2

## DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Penerimaan Negara



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Fraksi Terhadap RAPBN 2017 dari Menkeu Sri Mulyani.

DPR RI menggelar rapat Paripurna, dengan agenda tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Selasa (30/8). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Taufik Kurniawan.

Taufik meminta pemerintah perlu menyiapkan rencana alternatif apabila target penerimaan negara dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak tercapai. Meskipun diakuinya langkah-langkah yang sedang dilakukan pemerintah terkait *tax amnesty* masih sedang berjalan.

"Semua sedang *on progress*, terhadap *update* ekonomi global yang sedang berlangsung, termasuk salah satunya asumsi *tax amnesty* bisa mencapai target dan seterusnya," ujarnya.

Kendati demikian, Taufik tidak memungkirinya adanya kendala di lapangan. Oleh sebab itu perlu diantisipasi dengan menggunakan rencana alternatif. Hal tersebut dapat diterapkan pemerintah, apabila target pengampunan pajak tidak tercapai.

"Format *tax amnesty* adalah untuk membawa masuk dana yang diparkir di luar, bukan memperluas *database* pajak dalam negeri, sehingga seolah dipersepsikan masyarakat dikejar-kejar. Makanya saya menyambut baik, Dirjen Pajak sudah melakukan pembatasan minimal tidak kena pajak, sehingga UMKM tidak terkena *tax amnesty*," papar Taufik.

Ia mengungkapkan, hal tersebut menjadi masukan agar pemerintah melakukan alternatif lain. Salah satunya,

dengan membuat program infrastruktur yang bertujuan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab, lanjut Taufik, apabila infrastruktur bagus, maka distribusi berjalan dengan baik, harga barang dan jasa pun kompetitif.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, pandangan pemerintah terhadap fraksi nantinya akan ditindaklanjuti di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Selanjutnya, akan dilakukan tahapan pendalaman, terkait dengan kondisi ekonomi yang kekinian.

"Mungkin ada terobosan baru antara pemerintah dan DPR, yang tidak hanya mengandalkan *tax amnesty* saja pada saat mengendalikan defisit neraca transaksi yang sedang berjalan," kata dia.

Taufik berharap, situasi asumsi makro tidak hanya menjadi sekadar slogan. Akan tetapi, harus dapat mencerminkan kondisi mikro di seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, tidak perlu berkuat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi nyata. Pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang padat karya dan menyangkut massal.

Taufik menambahkan, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diharapkan akan sesuai. DPR sendiri masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan beragam upaya untuk memaksimalkan APBN 2017.

"Semua lagi *progress*, kita berikan kesempatan semua *stakeholder* negeri ini untuk segera menyelesaikan," ungkap Taufik.

### Target pertumbuhan

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah sependapat

dengan sejumlah fraksi, terkait target pertumbuhan ekonomi 2017. Namun, di sisi lain juga harus berlandaskan pada perhitungan yang realistis demi menjaga kredibilitas fiskal.

Walaupun lanjut dia, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2017 diproyeksikan akan lebih baik. Namun, pemerintah tetap mewaspadai adanya potensi risiko global, seperti harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut.

Sri Mulyani juga memberikan jawaban atas pandangan umum dari sejumlah fraksi. Salah satunya, terkait dengan target penerimaan perpajakan, dan kebijakan *tax amnesty*.

"Pemerintah semaksimal mungkin akan berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan, dan meningkatkan *tax ratio* hingga mencapai kisaran 13 persen terhadap PDB," katanya.

Sejalan dengan itu, kata dia, pemerintah telah menetapkan sasaran penerimaan perpajakan yang lebih realistis dan terukur dengan memperhitungkan kondisi perekonomian nasional, regional, dan global.

Ia melanjutkan, upaya-upaya untuk mencapai target penerimaan perpajakan akan terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan perpajakan. Antara lain, memberikan kemudahan dalam pembayaran, pelaporan, dan akses informasi perpajakan, peningkatan efektivitas penagihan, pemeriksaan dan penegakan hukum perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan dan lainnya. ●/rl